

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pembangunan dalam berbagai bidang telah menjadi tujuan yang di cita-citakan suatu daerah demi menuju kemajuan dalam mewujudkan pembangunan daerah. Dengan alasan tersebut tentunya pemerintah yang dalam hal ini merupakan aktor utama sebagai penentu arah untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan visi dan misi daerah tersebut yang mana dalam merumuskan visi dan misi, mempunyai kejelian dengan melihat latar belakang daerah yang sesuai dengan tujuan dan potensi yang ada baik dari sisi soial, budaya, ekonomi, politik bahkan sampai sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki. Untuk mewujudkan pembangunan desa seperti yang diharapkan tentunya membutuhkan kepemimpinan yang benar-benar potensial baik dari sumber daya manusia, menjunjung tinggi efektivitas dan efesiensi terhadap penyelenggara sebuah pemerintahan. Berangkat dari pemikiran di atas pemerintah yang sangat berperan penting dalam mewujudkan pembangunan, dengan adanya peran pemerintah yang benar-benar terkonseptual maka dapat dijamin bahwa pembangunan bisa terwujud secara efektif.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bertujuan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut

dalam pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut, yang salah satunya adalah melalui pemberian otonomi daerah secara luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat tersebut, pemerintah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka, pemerintah mempunyai andil yang sangat besar dalam menghadapi masalah kemiskinan yang tengah dihadapi oleh negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, dan yang lebih

parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dan sandang.

Mengutip dari pendapat Mikelsen kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Juliardi, 2014:198). Selanjutnya menurut Lubis miskin didefinisikan sebagai ketidakmampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu bentuk kemiskinan tidak hanya unidimensi tetapi mencakup juga kemiskinan insani dan kemiskinan martabat Lubis, 2004, (dalam Juliardi, 2014:154)

Dapat dikatakan bahwa Kemiskinan juga dapat membuat masyarakat tidak mampu untuk hidup layak dan memiliki aset baik berupa aset finansial maupun aset non finansial. Banyak dampak yang terjadi yang disebabkan oleh kemiskinan antara lain Banyak penduduk Indonesia yang kelaparan karena tidak mampu untuk membeli kebutuhan akan makanan sehari-hari, tidak bersekolah (tingkat pendidikan yang rendah) ini menyebabkan masyarakat di Indonesia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memperoleh pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memperoleh pendapatan, dan yang lebih parahnya lagi kemiskinan membuat masyarakat Indonesia jauh dari yang namanya kesejahteraan.

Dewasa ini masalah tentang kesejahteraan masyarakat merupakan isu yang sangat serius diperbincangkan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri, Keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini dirasakan masih sangat memprihatinkan sampai di tingkat desa. Dalam rangka untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, maka pemerintah desa yang sangat berperan dalam rangka

meningkatkan mutu masyarakat adalah suatu tindakan atau kegiatan dari pemerintah desa mengenai tugas dan kewajibannya dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat di dalamnya.

Selaras dengan pemikiran di atas pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dimana pemberdayaan masyarakat sendiri adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah desa serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat dapat secara mandiri mengubah kondisi mereka dan secara aktif turut berpartisipasi dalam upaya perbaikan kondisi kemiskinan

Namun berdasarkan kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak masyarakat desa yang belum merasakan kesejahteraan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di desa Ayula Selatan Kecamatan Bulanggo Selatan masyarakat di desa Ayula masih banyak yang belum merasakan kesejahteraan hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai kesejahteraan dimana tingkat kesejahteraan itu masih belum dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Kurangnya kesejahteraannya masyarakat disebabkan oleh terbatasnya dana anggaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa Ayula

Selatan untuk penanggulangan kemiskinan belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan dan berakibat tingkat kemiskinan di desa Ayula Selatan.

Jika pemerintah desa tidak mengantisipasi permasalahan tersebut, maka pembangunan desa akan tidak terlaksana dengan baik, karena pembangunan desa bisa terlaksana apabila masyarakatnya sejahtera dan memiliki penghidupan yang layak dalam kehidupannya. Sehingga angka kemiskinan tidak dapat diminimalis atau dengan mata lain angka kemiskinan masyarakat akan terus bertambah.

Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah desa harus melakukan langkah strategis dalam mengatasinya dengan cara mengembangkan ekonomi kemasyarakatan dengan mengelola seluruh potensi ekonomi desa, mengembangkan sumber daya manusia misalnya mengembangkan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan kerja; dan pengembangan infrastruktur pedesaan dengan membangun prasarana ekonomi dan prasarana desa. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan akan mengurangi angka kemiskinan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut perlu diadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa Ayula Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Mengurangi Angka Kemiskinan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di desa Ayula Selatan
2. Terbatasnya dana anggaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa Ayula Selatan untuk penanggulangan kemiskinan belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan.
3. Masyarakat belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Ayula Kecamatan Bulango Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kemiskinan di desa Ayula selatan Kecamatan Bulango Selatan?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah desa mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Ayula Kecamatan Bulango Selatan

2. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan.
3. Untuk mengetahui serta mengkaji informasi secara lebih dalam tentang bagaimana upaya pemerintah di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan untuk mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui upaya pemerintah desa mengurangi angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di desa Ayula Kecamatan Bulango Selatan. Sehingga diharapkan dikemudian hari mampu membandingkan teori yang diperoleh diperkuliahaan serta aplikasinya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat Bone Bolango, lebih khususnya di desa Ayula Selatan mengenai peran pemerintah desa dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.